

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketika kita mengukur keberhasilan suatu negara, kita dapat memahami dari perkembangan ekonomi. Jika keberhasilan pemerintah adalah kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kemakmuran manusia adalah cita-cita setiap negara di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui negara, pemerintah dan pegawainya terus mengoptimalkan indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : *perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.* Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Dari periode ke periode, kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan kapasitas ini disebabkan oleh faktor produksi yang selalu meningkat secara kuantitas dan kualitas (Sadono Sukiro 2015:9). Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ditinjau berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mempresentasikan pendapatan nasional riil yang dihitung berdasarkan holistik hasil berdasarkan barang & jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan berdasarkan periode sebelumnya. Intinya merupakan barang

& jasa yang diproduksi pada suatu negara tadi wajib habis supaya ekonomi bertumbuh.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Domestik Bruto**  
**Tahun 2015-2020**  
**(Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Pendapatan Domestik Bruto (PDB)</b>
2015	I	2,158,040.00
	II	2,238,704.40
	III	2,312,843.50
	IV	2,272,929.20
2016	I	2,264,721.00
	II	2,355,445.00
	III	2,429,260.60
	IV	2,385,186.80
2017	I	2,378,146.40
	II	2,473,512.90
	III	2,552,296.90
	IV	2,508,971.90
2018	I	2,498,697.50
	II	2,603,852.60
	III	2,684,332.20
	IV	2,638,969.60
2019	I	2,625,180.50
	II	2,735,414.10
	III	2,818,812.70
	IV	2,769,748.10
2020	I	2,703,033.00
	II	2,589,789.10
	III	2,720,491.90
	IV	2,709,740.80

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Tahun 2018 pada triwulan II mengalami kenaikan yang pesat yaitu sebesar 2,603,852.60 dan tahun 2020 pada triwulan II mengalami penurunan yang sangat merosot yaitu sebesar 2,589,789.10. Kondisi buruk perekonomian Indonesia sepanjang tahun lalu lantaran terdampak pandemi Covid-19. Roda perekonomian harus terhambat lantaran kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat. Ekonomi Indonesia mulai minus pada triwulan II-2020 dan berlanjut sampai triwulan IV-2020.

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat, seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal. Sistem pembayaran berubah dari waktu ke waktu, dimulai dengan sistem pembayaran tunai dalam mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi, muncul sistem pembayaran baru yang disebut cashless payment dan peran uang tunai dalam transaksi mulai menghilang.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu mengatur dan menjaga mekanisme sistem keuangan agar tetap stabil. Sistem pembayaran yang dimaksud adalah secara tunai maupun non tunai. Pada sistem pembayaran tunai Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengeluaran dan peredaran uang tunai kepada masyarakat. Namun seiring waktu penggunaan nilai transaksi pembayaran tunai menimbulkan banyak permasalahan dan kelemahan.

Sehingga dibutuhkan inovasi sistem pembayaran yang mampu menjawab permasalahan dan membenahi kelemahan dari sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran non tunai tercipta sebagai wujud inovasi lebih lanjut pada sistem keuangan yang lebih efisien (Bank Indonesia, 2009).

Sistem pembayaran yang less cash ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Contoh pembayaran non tunai yaitu kartu kredit dan kartu debit yang digunakan untuk pembelanjaan di toko besar atau swalayan. Namun seiring berkembangnya teknologi, pembayaran non tunai dapat dilakukan tidak hanya dengan kartu tersebut dan juga untuk tujuan lain selain pembelanjaan. Selain kartu kredit dan kartu debit, sekarang sudah muncul uang elektronik atau yang sering disebut e-money. Beberapa negara sudah banyak menggunakan transaksi non tunai seperti Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, dan lain-lain.

Pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*), meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan atau transaksi dengan nilai *ticket size*  $\geq$  Rp1 Miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement*

*System* (BI-SSSS). Sedangkan transaksi ritel meliputi transaksi antar individu dengan nilai *ticket size* < Rp1 Miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memroses aktivitas transaksi ini adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Penggunaan sistem pembayaran nontunai sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 46,07 transaksi per penduduk dewasa (data November 2021) atau lebih tinggi dari target minimal 41,8 transaksi per penduduk dewasa per tahun pada akhir tahun 2021. Perkembangan ini dapat mengindikasikan dua hal, yakni (i) peningkatan efisiensi transaksi masyarakat yang sebelumnya menggunakan instrumen pembayaran tunai menjadi nontunai dan (ii) peningkatan transaksi perdagangan ritel masyarakat yang turut mendorong inklusi keuangan yang tercermin dari bulk volume transaksi nontunai yang lebih dari 90% merupakan transaksi ritel dengan ticket size per transaksi yang relatif kecil. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dimana mobilitas masyarakat dibatasi dengan PPKM sehingga diperlukan instrumen pembayaran nontunai untuk melancarkan pembayaran transaksi masyarakat (Bank Indonesia).

Dari data tabel 1.2 jika dilihat dari nilai transaksinya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan artinya semakin meningkatnya pengguna Kartu Kredit, Debet/ATM, dan E-Money di Indonesia. seperti yang terlihat pada nilai transaksi E-Money dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang tinggi dan pesat.

Sama halnya di tahun 2021 mengalami kenaikan yang paling tinggi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Lain halnya dengan pertumbuhan Kartu Kredit dan Debet/ATM yang pertumbuhannya atau kenaikannya cenderung stagnan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nilai Transaksi Kartu Debet/ATM, Kartu Kredit, dan E-Money dari Tahun 2015-2020 (Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Kartu Debit/ATM</b>	<b>Kartu Kredit</b>	<b>E-money</b>
2015	I	376.644.533	23.296.590	37.995.797
	II	379.309.141	24.440.007	40.301.411
	III	375.894.521	23.189.500	42.714.621
	IV	426.658.783	26.805.021	34.314.795
2016	I	426.856.817	25.841.291	36.813.643
	II	457.305.293	25.735.683	39.575.555
	III	432.803.585	24.743.153	45.04.,204
	IV	475.610.928	28.349.527	51.204.580
2017	I	468.687.446	27.853.985	56.056.861
	II	495.129.624	26.466.534	63.707.377
	III	466.634.767	25.950.524	71.783.618
	IV	529.470.069	29.224.159	90.003.848
2018	I	530.232.506	27.977.532	109.775.772
	II	523.777.964	27.667.099	125.182.806
	III	528.158.444	26.274.567	142.477.296
	IV	597.107.612	30.642.193	167.205.578
2019	I	582.391.274	28.230.128	199.174.153
	II	559.405.998	27.120.802	209.891.847
	III	572.805.378	28.539.329	257.078.749
	IV	616.926.599	32.725.116	292.299.320
2020	I	561.258.036	27.168.332	330.391.364
	II	459.583.245	20.890.310	353.587.670
	III	560.531.471	20.345.622	393.904.001
	IV	639.033.670	23.595.782	432.281.380

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Saat ini pembayaran non tunai mengacu kepada penggunaan bentuk pembayaran secara digital, bukan uang tunai untuk pembayaran berbagai transaksi yang dilakukan oleh individu. Dalam penggunaan setiap transaksi non tunai memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3**

**Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pembayaran Non Tunai**

No.	Kelebihan	Kekurangan
1.	Transaksi lebih cepat	Adanya pembatasan
2.	Bebas masalah tentang uang kembalian	Resiko Hack
3.	Lebih praktis dan dapat di bawah kemana-mana	Boros
4.	Meminimalisir tindakan kejahatan	Butuh akses internet

*Sumber : Etchebakery,2019. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pembayaran Non Tunai*

Tingkat laju inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah ekspektasi terhadap laju inflasi dimasa yang akan datang. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) dalam jangka panjang. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan

oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi (Muh Abdul Halim, 2018).

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu (Bank Indonesia).



**Tabel 1.4**  
**Data Inflasi Tahun 2015-2020**  
**(Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Inflasi</b>
2015	I	6.38
	II	7.26
	III	6.83
	IV	3.35
2016	I	4.45
	II	3.45
	III	3.07
	IV	3.02
2017	I	3.61
	II	4.37
	III	3.72
	IV	3.61
2018	I	3.4
	II	3.12
	III	2.88
	IV	3.13
2019	I	2.48
	II	3.28
	III	3.39
	IV	2.72
2020	I	2.96
	II	1.96
	III	1.42
	IV	1.68

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan fenomena transaksi pembayaran non tunai di Indonesia dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya permasalahan yang cukup rumit ini dan adanya perubahan transaksi pembayaran di Indonesia, sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara ilmiah, untuk mewujudkan

hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia Periode 2011-2021”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah nilai transaksi kartu debit/ATM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah nilai transaksi kartu kredit terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah nilai transaksi E-money terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah nilai transaksi kartu debit/ATM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah nilai transaksi kartu kredit terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah nilai transaksi E-money terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.